

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan-Badan.

Pengelolaan pajak dan retribusi dilakukan melalui tindakan pelayanan, pengawasan dan pembinaan dengan berlandaskan kepada peraturan perundangundangan perpajakan. Bukan hanya berupa kegiatan dalam lingkup administratif belaka, oleh karenanya pajak dan retribusi sangat berkaitan dengan tata kelola dan masuk kedalam lingkup kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam kajian administrasi perpajakan, salah satu ruang lingkup dalam administrasi perpajakan adalah tentang pemungutan pajak dan retribusi (collection) di suatu daerah.

Terkait dengan pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi juga termasuk ke dalam penerimaan daerah dan untuk membiayai pembangunan di suatu daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, di mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas rencana kerja SKPD pemerintah daerah tahun 2018.

a. Tugas Pokok.

BP2RD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemerintahan Umum melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pendapatan daerah yang mencakup optimalisasi pelayanan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan), pelayanan pungutan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah, fasilitasi pelayanan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi BP2RD antara lain adalah :

- 1) Melakukan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan fasilitasi pendapatan daerah, yang mencakup optimalisasi pelayanan pungutan pajak bumi dan bangunan, optimalisasi pelayanan pungutan pajak daerah, tertib pelaksanaan pembukuan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan bea perolehan hak atas tanah bangunan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan evaluasi perolehan, pemungutan, penatausahaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan evaluasi perolehan, pemungutan, penatausahaan pendapatan Retribusi dan lain-lain Pajak Daerah.
- 4) Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan evaluasi perolehan, pemungutan, penatausahaan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 5) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis dinas.
- 6) Melakukan koordinasi teknis dengan SKPD terkait yang berkaitan dengan PAD, dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi BP2RD dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD, BP2RD harus memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai BP2RD.

- 7) Melakukan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan serta pembukuan dan pelaporan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar tugas pokok dan fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa BP2RD berperan dalam hal :

- 1) Mengkoordinir dan mengkoordinasikan dinas/badan/bagian maupun komponen lainnya dalam usaha pencapaian optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Mengadministrasikan/meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah maupun sumber Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan P-2 , pelayanan pungutan Retribusi dan Pajak Daerah, Pelayanan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 3) Mengelola Pendapatan Asli Daerah secara baik, Transparan dan Akuntabel.

c. Susunan Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah, Bidang PBB P2, dan Bidang BPHTB :

1. Sekertariat.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.

2. Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi.

Kasubbid Pengembangan Penetapan Pajak Daerah.

Kasubbid Fasilitasi Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah.

3. Bidang PBB P2.

Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB.

Kasubbid Peningkatan Pemungutan PBB.

4. Bidang BPHTB.

Kasubbid Pendataan dan Verifikasi BPHTB.

Kasubbid Penagihan BPHTB

1.3. FUNGSI STRATEGIS.

Fungsi Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka disusun beberapa strategi sesuai dengan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- 1) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk taat pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melaksanakan sistem informasi pendapatan asli daerah.
- 3) Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan koordinasi evaluasi.
- 4) Melaksanakan pengembangan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Melaksanakan pendataan terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Menyiapkan kemampuan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima.
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.
- 9) Meningkatkan dan pengadaan sarana dan prasarana Aparatur.
- 10) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

1.4. ISU STRATEGIS ORGANISASI.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan BP2RD Kabupaten Barito Kuala sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Barito Kuala, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, BP2RD Kabupaten Barito Kuala menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan PAD maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam upaya peningkatan PAD adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

- 2) Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Masih dalam pelaksanaan sistem penerapan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.
- 6) Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programmer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7) Masih dalam upaya penyempurnaan Sistim dan Prosedur Pelayanan Pemungutan.

Isu strategis yang akan dilakukan BP2RD antara lain :

1. Mengintensifkan koordinasi antar SKPD terkait/SKPD penghasil;
2. Perlu adanya penambahan SDM yang ideal guna melayani pendataan dan penilaian objek pajak, melayani penerimaan berkas,entry data serta operator consule, melayani penagihan dan pelayanan keberatan yang diajukan WP sehingga pelayanan WP dan peningkatan Pad Kabupaten Barito Kuala bisa lebih optimal;
3. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat/WP sehingga masyarakat/WP menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
4. Adanya sanksi yang tegas bagi pengusaha/masyarakat/WP yang tidak membayar pajaknya sehingga ada efek jera dan pengusaha/masyarakat/WP termotivasi untuk membayar pajak;
5. Memberikan pelayanan proses birokrasi yang mudah dan cepat bagi pengusaha/WP;
6. Tersedianya fasilitas mobil keliling yang melayani pengurusan izin pajak dan membayar pajak sehingga masyarakat/WP bisa semakin dipermudah dalam membayar pajak;
7. Melaksanakan bintek/diklat guna peningkatan SDM pengelola PBB-P2 secara bertahap guna mengantisipasi tuntutan pelayanan terhadap WP.

1.5. LANDASAN HUKUM.

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.6. SISTEMATIKA.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS.

Berdasarkan Restra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2018 tentang maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran BP2RD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 adalah :

1) Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, sasaran BP2RD adalah :

- Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2018

No.	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran.	Indikator Kinerja.	Program	Pagu Program
1	2	3	4		
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah**	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 960.280.582,-

** retribusi daerah yang dikelola oleh BP2RD adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang antara lain beberapa rumah dinas dan tempat atau gedung yang disewakan atau digunakan pihak ketiga dan tempat atau tanah yang digunakan sebagai tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh pihak perbankan.

2.1.2. Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 adalah Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Prosentase Peningkatan naik dari target awal tahun sebelumnya.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala

No.	Indikator Kerja Utama	Formulasi
1	2	3
1.	1. Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Target tahun ini naik 7,5% daripada Target Awal Penerimaan Tahun Sebelumnya $N = 7,5\% \times TA-1$

Target dihitung naik 7,5% dari target realisasi penerimaan awal tahun sebelumnya, jadi apabila target realisasi awal tahun sebelumnya 100 maka target tahun ini akan menjadi 7,5 karena dikalikan dengan target 7,5% dan target realisasi penerimaan nya akan menjadi 107,5 pada tahun ini.

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BP2RD tahun 2018 di targetkan kepada 3 (tiga) bidang yang ada pada BP2RD Kabupaten Barito Kuala :

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018

No.	Pajak dan Retribusi Daerah	Yang Menangani	Target Awal Tahun Sebelumnya (2017)	Target Sasaran Strategis	Realisasi 2018	
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 	Kepala Badan Ess II	Rp. 19.188.888.955	7,5%	Rp. 1.439.166.672	2.677,92% Rp. 38.539.840.417,-
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Hotel. ▪ Pajak Restoran. ▪ Pajak Hiburan. ▪ Pajak Reklame. ▪ Pajak PJU. ▪ Pajak Minerba. ▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 	Bidang PdRd Ess III	Rp. 11.002.866.227	7,5%	Rp. 805.087.773	336,54% Rp. 2.712.848.251,-
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan. 	Bidang PBB Ess III	Rp. 2.119.886.364	7,5%	Rp. 155.113.636	549,45% Rp. 852.281.265,-
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 	Bidang BPHTB Ess III	Rp. 6.066.136.364	7,5%	Rp. 443.863.636	7.879,60% Rp. 34.974.710.901,-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan dan Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya. 	Bid PdRd Ess IV			350 WP Baru	100% 350 WP Baru

	• Penetapan dan Sosialisasi Retribusi Daerah.	Bid PdRd Ess IV			2.000 Leaflet Brosur	100%	2.000 Leaflet Brosur
	• Pendataan dan Penetapan PBB-P2.	Bid PBB Ess IV			750 OP PBB P2 Baru	293,2%	2.199 OP PBB P2 Baru
	• Penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2.	Bid PBB Ess IV			92.000 Sppt PBB P2	99,8%	91.816 Sppt PBB P2
	• Penerimaan dan Piutang PBB-P2.	Bid PBB Ess IV			40.000 OP PBB	7,93%	3.174 OP PBB
	• Pendataan Potensi dan Pelayanan Verifikasi BPHTB.	Bid BPHTB Ess IV			35 Lap Perjalanan Dinas	100%	35 Lap Perjalanan Dinas
	• Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB.	Bid BPHTB Ess IV			24 Lap Perjalanan Dinas	100%	24 Lap Perjalanan Dinas

2.2. PERJANJIAN KINERJA

2.2.1. Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2018 Perjanjian Kinerja yang dibuat meliputi Perjanjian Kepala Badan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditargetkan

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2018

Ess	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Anggaran
Ess II	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	7,5%**	1 Program Utama 4 Program Rutin	Rp. 960.832.555,- Rp. 1.585.909.645,-
Ess III Bid. PdRd	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah.	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah.	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah	Persentase	7,5%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 147.928.375,-
Ess III Bid.	Meningkatnya Realisasi Penerimaan	Meningkatnya Realisasi Penerimaan	Prosentase Peningkatan Realisasi	Persentase	7,5%	Program Peningkatan dan	Rp. 627.502.905,-

PBB	Pajak PBB-P2.	Pajak PBB-P2.	Penerimaan Pajak PBB-P2.			Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Ess III Bid. BPHTB	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB..	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB..	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB.	Persentase	7,5%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 153.563.750,-
Ess IV Bid. PdRd	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah Lainnya yang Baru.	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah Lainnya yang Baru.	Jumlah Pendataan Wajib Pajak Daerah Lainnya yang Telah terdata.	Angka	350 WP Baru	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 97.665.575,-
Ess IV Bid. PdRd	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Retribusi Daerah.	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pembuatan Leaflet Untuk Sosialisasi Retribusi Daerah.	Angka	2000 Leaflet Brosur	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 50.262.800,-
Ess IV Bid. PBB	Terlaksananya Pendataan, Penetapan Potensi Wajib Pajak PBB Baru.	Terlaksananya Pendataan, Penetapan Potensi Wajib Pajak PBB Baru.	Jumlah Potensi Wajib Pajak PBB yang telah didata dan ditetapkan.	Angka	750 OP PBB P2 Baru	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 301.488.500,-
Ess IV Bid. PBB	Terlaksananya Distribusi SPPT PBB-P2.	Terlaksananya Distribusi SPPT PBB-P2.	Jumlah SPPT PBB-P2 yang telah didistribusikan.	Angka	92.000 Sptt PBB P2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 283.741.530,-
Ess IV Bid. PBB	Terlaksananya Penagihan Piutang PBB-P2.	Terlaksananya Penagihan Piutang PBB-P2.	Jumlah Objek Piutang PBB pembayaran piutang PBB-P2.	Angka	40.000 Objek Piutang PBB	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 42.272.875,-
Ess IV Bid. BPHTB	Terlaksananya Pendataan Potensi Wajib Pajak BPHTB Baru.	Terlaksananya Pendataan Potensi Wajib Pajak BPHTB Baru.	Jumlah Perjalanan Dinas Pendataan Potensi BPHTB Baru.	Angka	35 Lap Perjalanan Dinas	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 84.363.300,-
Ess IV Bid. BPHTB	Terlaksananya Koordinasi BPHTB.	Terlaksananya Koordinasi BPHTB.	Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi BPHTB dengan pihak terkait Notaris/PPAT/BPN/Pengembang.	Angka	24 Lap Perjalanan Dinas	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 69.200.450,-

** Target yang ditentukan adalah 7,5% Inaik dari pada target awal tahun sebelumnya.

** 4 program yang menjadi satu dengan program di bidang tata usaha dalam pemenuhan kinerja dan pemeliharaan gedung dan alat kantor.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2018, Renja Tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.AB

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.2. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 188.45/029c /BPPRD/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	7,5%	2.677,92%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Prosentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : dengan target 7,5% naik dari target penerimaan awal tahun sebelumnya dengan pencapaian sampai akhir tahun 2018 sebesar 2.677,92% atau dalam rupiah dengan target tahun 2018 sebesar Rp. 1.439.166.672,- dengan target penerimaan awal tahun 2017 sebesar Rp. 19.188.888.955,- berhasil terealisasi sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp. 38.539.840.417,-

Tabel 3.2.

Capaian Substantif Indikator Kinerja Tiap Bidang BP2RD Tahun 2018

No	Uraian Capaian Substantif Objek Pajak	Capaian Substantif		%
		2017	2018	Kenaikan / Turun
1.	Objek Pajak Lainnya (Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Minerba, PPJU)	85.575 OP	124.457 OP	Naik 45,43%
2.	Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	19 OR	13 OR	Turun 46,15%
3.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	94.453 Objek PBB	97.746 Objek Pbb	Naik 3,48%
4.	Objek Pajak BPHTB.	2.628 Objek BPHTB	2.635 Objek BPHTB	Naik 0,26%

** Data didapat dari laporan substantif dari bidang bidang yang dikumpulkan setiap bulan dalam laporan pencapaian kinerja kegiatan.

Tabel 3.3.
Capaian IKU Ess II Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Persentase
Tahun 2018

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	1

Tabel 3.4.
Capaian IKU Ess II Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Kategori
Tahun 2018

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Berdasarkan table 3.4 didapatkan capaian 1 (satu) Indikator yang Sangat Baik dari 1 (satu) Indikator Kinerja BP2RD.

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 188.45/ 029c /BPPRD/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Pajak Daerah
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Peningkatan Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Pajak Lainnya : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Hotel. ▪ Pajak Restoran. ▪ Pajak Hiburan. ▪ Pajak Reklame. ▪ Pajak PJU. ▪ Pajak Minerba. Retribusi Daerah : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Pajak PBB P2. 3. Pajak BPHTB.

Tabel 3.6.
Capaian Sasaran Kinerja Bidang Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018

No	Sasaran	Bidang	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah	1. Pajak lainnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Hotel. ▪ Pajak Restoran. ▪ Pajak Hiburan. ▪ Pajak Reklame. ▪ Pajak PJU. ▪ Pajak Minerba. ▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 	336,54%	Melebihi Target
2.		PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan.	549,45%	Melebihi Target
3.		BPHTB	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	7.879,6%	Melebihi Target

- Tabel diatas merupakan capaian dari target 7,5% dari target realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang ditetapkan di BP2RD pada tahun 2018 dan dari ketiga bidang yang ada di BP2RD pada tahun 2018 dapat melebihi target atau lebih dari 100% pencapaiannya, dari ketiga bidang di BP2RD dapat dijelaskan alasan pencapaian tersebut :

- Bidang Pajak lainnya dan Retribusi.

Pencapaian 336,54% pada tahun 2018 dikarenakan adanya peningkatan Pajak Penerangan Jalan Umum akibat dari bertambahnya jumlah pelanggan PLN baru dari bertambahnya perumahan terutama dari Kecamatan Alalak pada tahun 2018, bertambahnya kesadaran wajib pajak mengenai Pajak Catering dan Pajak Mineral Bukan Logam yang banyak sebelumnya tersetor ke pajak pusat yaitu PPh23 padahal sudah menjadi pajak daerah yaitu pajak catering dan jasa boga dan pajak mineral bukan logam dan batuan, serta perpanjangan Kontrak Sewa Tempat Bank Kalsel di kantor BP2RD pada tahun 2018 mengakibatkan meningkatnya pendapatan retribusi daerah pada tahun 2018.

- Bidang PBB P2.
Pencapaian 549,45% pada tahun 2018 akibat dari beberapa hal yang dilakukan bidang PBB pada tahun 2018 antara lain dengan penilaian ulang BTS (Base Transceiver Station) atau tower menara komunikasi, kenaikan tariff minimal PBB dari 10.000 menjadi 15.000, banyaknya Objek Pajak PBB Baru pada tahun 2018 yaitu kurang lebih 2.199 OP PBB P2, dan pembayaran piutang PBB tahun tahun sebelumnya.
- Bidang BPHTB.
Pencapaian 7.879,6% pada tahun 2018 dikarenakan terjadi penambahan target sebesar 30 Milyar lebih dari adanya pembayaran BPHTB dari HGU (Hak Guna Usaha) beberapa perusahaan kelapa sawit dan galangan kapal pada tahun 2018 yang pada saat penetapan rencana target penerimaan belum dapat diprediksi kepastian terbitnya SK HGU dari Kementerian Agraria Republik Indonesia yang menjadi dasar timbulnya pajak BPHTB di daerah.

Tabel 3.7.

**Capaian Kinerja Sasaran Tiap Bidang Dengan Pagu Anggaran Dana yang Diberikan
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Tahun 2018**

No	Sasaran	Bidang	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 -74,99 Cukup	75 -89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah.	1. Pajak lainnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Hotel. ▪ Pajak Restoran. ▪ Pajak Hiburan. ▪ Pajak Reklame. ▪ Pajak PJJU. ▪ Pajak Minerba. ▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 	97,18%					Sangat Baik
2.		Bidang PBB-P2.	2. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan.	74,68%					Cukup
3.		Bidang Pajak BPHTB.	3. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	92,05%					Sangat Baik

Tabel diatas menjelaskan capaian realisasi pagu anggaran yang diberikan di tiap bidang pada tahun 2018, Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi terealisasi sebesar Rp. 173.946.835,- dari pagu sebesar Rp. 179.765.900,- atau 97,18% , Bidang Pajak PBB P2 terealisasi sebesar Rp. 486.708.881,- dari pagu sebesar Rp. 627.502.905,- atau 74,68%, Bidang BPHTB terealisasi sebesar Rp. 140.624.866,- dari pagu sebesar Rp. 153.563.750,- atau 92,05%.

Tabel 3.8.
Pencapaian Target Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah.
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Pajak lainnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Hotel. ▪ Pajak Restoran. ▪ Pajak Hiburan. ▪ Pajak Reklame. ▪ Pajak PJU. ▪ Pajak Minerba. ▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 	336,54%	1	336,54
		Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan.	549,45%	1	549,45				
		Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	7.879,6%	1	7.879,6				

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rata-rata realisasi sebesar 2.921,86% dari ketiga jumlah indikator kinerja sasaran strategis.

Untuk melihat capaian sasaran strategis Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ada 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan, yaitu

- 1) Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya (Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJU, Minerba), dan Retribusi Daerah.
- 2) Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2).
- 3) Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB.

Capaian sasaran dengan tiga indikator tersebut pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Table 3.9.
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2017 – 2018

No	Indikator	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Selisih	Ket
			Realisasi	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Rupiah.	48.220.206.746,-	57.728.729.372,-	9.508.522.626,-	Mengalami selisih kenaikan sebesar Rp. 9.508.522,626,-

- Capaian Realisasi Pendapatan tahun 2017 dan 2018 dalam satuan rupiah merupakan hasil realisasi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi yang didapat dalam tahun anggaran 2017 dan 2018.

Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah satu program dengan tujuh kegiatan yang terbagi di tiga bidang yang berada di BP2RD dengan rincian sebagai berikut :

- **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan Tujuh Kegiatan :
 - 1) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan, Penetapan dan Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya.**
 - 2) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan, Penetapan dan Sosialisasi Retribusi Daerah.**
 - 3) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan dan Penetapan PBB-P2.**
 - 4) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah melalui Penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2.**
 - 5) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan dan Piutang PBB-P2.**
 - 6) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan Potensi dan Pelayanan Verifikasi BPHTB.**
 - 7) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB.**

Keberhasilan pencapaian realisasi indikator sasaran tahun 2018 terhadap target yang diperjanjikan disebabkan oleh

:

- Peningkatan Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2018 dapat terealisasi sebesar Rp. 13.715.714.478,- atau 115,51% dari target sebesar Rp. 11.873.792.500,- hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Realisasi Penerimaan Pajak Hotel/Penginapan/Spa/Pemandian Uap adalah sebesar **Rp. 72.442.975,-** atau **129,36 %** dari target **Rp. 56.000.000,-** terdapat selisih lebih penerimaan melampaui target sebesar **Rp. 16.442.975,-** hal ini disebabkan seiring dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang berdampak pada tingkat kedatangan tamu dan wisatawan di Kabupaten Barito Kuala dengan terbukanya daerah dan seiring dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dari BP2RD Kabupaten Barito Kuala.
 - Realisasi Penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan adalah sebesar **Rp. 197.357.368,-** atau **110,72 %** dari target **Rp. 178.237.500,-** terdapat lebih penerimaan melampaui target sebesar **Rp. 19.119.868,-** hal ini seiring dengan bertambahnya rumah makan dengan klasifikasi restoran di Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan meningkatnya kesadaran pengusaha restoran untuk membayar pajak.
 - Realisasi Penerimaan Pajak Jasa Boga/Katering adalah sebesar **Rp. 1.194.960.848,-** atau **246,51 %** dari target **Rp. 484.740.000,-** terdapat selisih lebih penerimaan melampaui target sebesar **Rp. 710.220.848,-** hal ini disebabkan upaya sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan secara kontinyu terhadap para pengusaha jasa katering/boga dan juga seiring dengan banyaknya kegiatan kegiatan rapat dan musyawarah di desa desa yang mendapat dana ADD serta kegiatan di sekolah-sekolah SD dan SMP juga mempengaruhi pendapatan pajak jasa boga / katering ini.
 - Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Permainan Biliard, Karaoke dan Permainan Ketangkasan) adalah sebesar Rp. 11.000.000,- atau **105,26 %** dari target sebesar **Rp. 8.200.000,-** terdapat selisih lebih penerimaan sebesar **Rp. 2.800.000,-** hal ini disebabkan upaya sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan terhadap pelaku usaha di sektor hiburan dan koordinasi dengan pihak terkait.
 - Realisasi Penerimaan Pajak Reklame adalah sebesar **Rp.375.263.400,-** atau **105,26%** dari target **Rp. 356.500.000,-** terdapat selisih lebih penerimaan melampaui

target sebesar **Rp. 18.763.400,-** hal ini disebabkan upaya sosialisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan, dan semakin baiknya koordinasi antar instansi terkait untuk penegakan aturan dalam hal pemasangan reklame yang dilakukan bersama oleh BP2RD, Kantor Pelayanan Terpadu dan Satpol PP.

- Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (6%) adalah sebesar **Rp. 10.964.894.312,-** atau **104,42 %** dari target **Rp. 10.500.000.000,-** terdapat selisih lebih penerimaan melampaui target sebesar **Rp. 464.894.312,-** hal ini disebabkan seiringnya peningkatan pembangunan perumahan dan ruko serta toko-toko di daerah Handil Bakti Kec. Alalak, Kec. Anjir Pasar, Kec. Anjir Muara serta Kec. Mandastana yang menyambungkan jaringan listrik baru.
- Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebesar **Rp. 836.633.575,-** atau **295,10 %** dari target **Rp. 283.500.000,-** terdapat selisih lebih penerimaan melampaui target sebesar **Rp. 553.133.575,-** hal ini disebabkan upaya sosialisasi intensifikasi ekstensifikasi yang dilakukan terhadap para pelaku usaha, pembangunan dan kontruksi yang dilakukan pada desa desa yang menerima dana ADD juga mempengaruhi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan ini, juga adanya koordinasi dengan para pihak- pihak terkait.
- Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar **Rp. 390.000,-** atau **108,33%** dari target **Rp. 360.000,-** pada tahun 2018 adalah karena adanya sosialisasi secara persuasif dari BP2RD kepada masyarakat pengusaha sarang burung walet yang menghasilkan adanya pembayaran, penerimaan ini merupakan pendapatan tahun kedua dari pajak sarang burung walet, dikarenakan masih dalam proses awal sosialisasi yg dilaksanakan oleh Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi sehingga ada penerimaan.
- Pada tahun 2018, BP2RD memiliki anggaran pendapatan asli daerah dari pendapatan retribusi daerah berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Realisasi sebesar **Rp. 62.772.000,-** atau **1.003,54%** dari target **Rp. 6.255.000,-**, target penerimaan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BP2RD di targetkan dari sewa Rumah Dinas dan Tempat atau Tanah yang dipergunakan sebagai Kantor atau Tempat Anjungan Tunai Mandiri oleh pihak Bank Kalsel, Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2018 dengan Realisasi sebesar Rp. 62.772.000,-

- Peningkatan Jumlah Realisasi Pajak PBB P2 pada Tahun 2018 dapat terealisasi sebesar **Rp. 2.972.167.629,-** atau **(129,22%)** dari target sebesar **Rp. 2.300.000.000,-** hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebesar **Rp. 2.972.167.629,-** atau **129,22%** dari target **Rp. 2.300.000.000,-** terdapat selisih lebih penerimaan melampaui target sebesar **Rp. 672.167.629,-**, jumlah tersebut telah di entry ke SIMDA Keuangan selama tahun anggaran 2018.

- Peningkatan Jumlah Realisasi Pajak BPHTB pada tahun 2018 sebesar **Rp. 41.040.847.265,-** atau **(129,43%)** dari target sebesar **Rp. 31.707.411.750,-** hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebesar **Rp. 41.040.847.265,-** atau **129,43 %** dari target **Rp. 31.707.411.750,-** terdapat selisih lebih penerimaan melampaui target sebesar **Rp. 9.333.435.515,-** hal ini disebabkan karena adanya upaya intensifikasi yang dilakukan terhadap pelaku usaha dan koordinasi dengan pihak terkait dan pesatnya perkembangan usaha perumahan yang ada di Kabupaten Barito Kuala dengan naiknya harga jual Objek Pajak dan meningkatnya jumlah transaksi jual beli objek pajak serta masuknya investasi HGU yang merupakan juga Objek Pajak BPHTB, serta adanya pembayaran dari beberapa perusahaan kelapa sawit dan galangan perkapalan pada tahun 2018 antara lain PT. Barito Putra Plantation pada tahun 2018 melakukan pembayaran sebesar Rp. 28.207.411.750,-, PT. Thaitech Indonesia sebesar Rp. 192.240.208,-, PT. 105 Elit Timber sebesar Rp. 217.598.800,-, PT Asih Banjarmasin sebesar Rp. 194.281.887,- PT. Gouka Indo Energi sebesar Rp. 106.400.000,- PT Gaharu Galangan Int sebesar Rp. 447.000.000,- PT Tiga Daun Kapuas sebesar Rp. 1.204.447.500,- dan PT. Barito Galangan sebesar Rp. 577.419.600,- ini mencerminkan membaiknya perekonomian dan kondusifnya dunia investasi di Kab Barito Kuala tahun 2018.

Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian %	Keterangan
			Realisasi 2018	Target Akhir Renstra 2017-2022		
1.	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rupiah	57.728.729.372,-	28.795.256.284,-	200,47%	Capaian melebihi target renstra di tahun 2018 ini dikarenakan adanya realisasi pembayaran pajak BPHTB yang besar karena adanya pembayaran HGU Perkebunan Kelapa Sawit yang telah jatuh tempo sehingga menjadikan penerimaan pada tahun 2018 telah melampaui target akhir Renstra BP2RD 2017-2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis **Rp. 57.728.729.372,-** atau sebesar **125,82 %**, dan untuk tahun 2018 sebagai tahun awal Renstra, namun telah melampaui target akhir renstra 2017-2022 BP2RD sebesar **Rp. 28.795.256.284,-**, hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh pegawai BP2RD dalam mensosialisasikan pembayaran pajak serta pendekatan persuasif penagihan piutang pajak kepada para wajib pajak yang masa pajaknya telah jatuh tempo serta adanya realisasi pembayaran BPHTB untuk HGU Perkebunan Kelapa Sawit yang telah jatuh tempo dalam jumlah besar pada tahun 2018.

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018
Dengan Capaian Provinsi dan Nasional.

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Keterangan
1.	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Rupiah	57.728.729.372,-	0,	0,	Pajak yang dipungut Kabupaten Berbeda dengan Provinsi dan Nasional

Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota berbeda jenis dengan pajak yang dipungut Provinsi dan Nasional.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 4.415.175.798,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.112.536.445,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,15 %.

Komposisi belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2018
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	2.546.742.200,-	2.281.061.959,-	89,57
2	Belanja Tidak Langsung	1.868.433.598,-	1.831.474.486,-	98,02
Jumlah		4.415.175.798,-	4.112.536.445,-	93,15

Sumber: SIMDA Keuangan BP2RD 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 89,57% terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018, dan sisanya sebesar 98,02% disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 960.832.555,- dengan realisasi sebesar Rp. 801.280.582,- atau 83,39 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Penetapan dan Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya.	126.780.975,-	121.905.160,-	96,15
2	Penetapan dan Sosialisasi Retribusi Daerah.	52.984.925,-	52.041.675,-	98,22
3	Pendataan dan Penetapan PBB-P2.	301.488.500,-	189.540.335,-	62,87
4	Penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2.	283.741.530,-	269.131.809,-	94,85
5	Penerimaan dan Piutang PBB-P2.	22.272.875,-	28.036.737,-	66,32
6	Pendataan Potensi dan Pelayanan Verifikasi BPHTB.	84.363.300,-	73.860.345,-	87,55

7	Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB.	69.200.450,-	66.764.521,-	96,48
	Jumlah	960.832.555,-	801.280.582,-	83,39

Sumber: SIMDA Keuangan BP2RD 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2018.

Selain itu, terdapat pula program dan kegiatan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2018. Realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja Program/Kegiatan Tugas Pembantuan pada tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik.
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 5) Penyediaan alat tulis kantor.
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 9) Penyediaan makanan dan minuman.
- 10) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
- 11) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 4) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor.
- 5) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
- 6) Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:

1) Penyelenggaraan pameran investasi / promosi daerah.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14.
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Penetapan dan Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya.	350 WP Baru	350 WP Baru (100%)	121.905.160,-	96,15
2	Penetapan dan Sosialisasi Retribusi Daerah.	2.000 Leaflet Brosur	2.000 Leaflet Brosur (100%)	52.041.675,-	98,22
3	Pendataan dan Penetapan PBB-P2.	750 OP PBB P2 Baru	2.199 OP PBB P2 Baru (293,2%)	189.540.335,-	62,87
4	Penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2.	92.000 Sppt PBB P2	91.816 Sppt PBB P2 (99,8%)	269.131.809,-	94,85
5	Penerimaan dan Piutang PBB-P2.	40.000 OP PBB	3.174 OP PBB (7,93%)	28.036.737,-	66,32
6	Pendataan Potensi dan Pelayanan Verifikasi BPHTB.	35 Lap Perjalanan Dinas	35 Lap Perjalanan Dinas (100%)	73.860.345,-	87,55
7	Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB.	24 Lap Perjalanan Dinas	24 Lap Perjalanan Dinas (100%)	66.764.521,-	96,48
	Jumlah		114,41%	801.280.582,-	83,39

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif/kurang efektif/tidak efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.5. ANALISA EFISIENSI.

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari beberapa sasaran menunjukkan pencapaian 100% atau lebih yaitu sebanyak 5 (lima) sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.15.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2018

No	Sasaran (Ess II dan III)	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Realisasi Penerimaan Pendapatan	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Ess II Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1	125,82	93,15	32,67%
2	Ess III Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah	1	115,51	97,18	18,33%
3	Ess III Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2.	1	129,22	74,68	54,54%
4	Ess III Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB.	1	129,43	92,01	37,42%
	Jumlah				

- Dari tabel diatas dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada BP2RD Kab. Barito Kuala tahun 2018 yang dihitung dari capaian realisasi penerimaan pendapatan rupiah dari target rupiah yang ditetapkan pada simda keuangan tahun 2018 dibagi dengan realisasi anggaran program pada SKPD untuk ess II dan realisasi anggaran kegiatan pada bidang-bidang yang berada di BP2RD.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) BP2RD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP BP2RD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini dapat menggambarkan Keberhasilan Kinerja BP2RD Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2018 BP2RD Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran utama Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pencapaian Sasaran Utama
Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2018

No	Sasaran (Ess II dan III)	Target 2018	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Pagu Anggaran 2018	Realisasi Pagu 2018 (%)
1	Ess II Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	45.881.204.250,-	57.728.729.372,- (125,82%)	4.415.175.798,-	4.112.536.445,- (93,15%)
2	Ess III Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya (hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJU, Minerba), dan Retribusi Daerah.	11.873.792.500,-	13.715.714.478,- (115,51%)	179.765.900,-	173.946.835,- (96,76%)
3	Ess III Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2)	2.300.000.000,-	2.972.167.629,- (129,22%)	627.502.905,-	486.708.881,- (77,56%)
4	Ess III Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB.	31.707.411.750,-	41.040.847.265,- (129,43%)	153.563.750,-	140.624.866,- (91,57%)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target, sasaran tersebut merupakan sasaran yang langsung berhubungan dengan target Indikator Kinerja Utama BP2RD yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.415.175.798,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.112.536.445,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,15%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 BP2RD Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 302.639.353,- atau 6,85%. Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.546.742.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.281.061.959,- atau 89,57%.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 dapat kami selesaikan, Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Marabahan, 11 Januari 2019
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala
Pengguna Anggaran,

ARDIANSYAH, S.Sos. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650508 198602 1 004